

Pembangunan Ekonomi Global 5 Negara Anggota Asean melalui QR Code Pasca Pandemi Covid-19

Elang Aryaduta¹

¹ Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

¹ Corresponding author email : indonesiaappleid@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 30-06-2024

Revised : 04-07-2024

Accepted : 13-07-2024

Keywords :

COVID-19, ASEAN, QR Code payments, and Quick Response Indonesian Standards



ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has significantly impacted various aspects of society, including the economic sector. The global economy suffered due to decreased public participation, affecting all countries, including ASEAN members. To enhance resilience and recovery from global uncertainties, promoting economic and financial inclusion is crucial. This study aims to examine the implementation of QR Code payments in the economic development of five ASEAN countries post-COVID-19. This qualitative research uses literature review to explore the role of QR Code in promoting economic recovery in Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, and Singapore. Data is collected from academic journals, government reports, and international organization publications, and analyzed through content analysis to identify themes and patterns related to QR Code usage and economic development. The findings indicate that QR Code payments have facilitated efficient transactions, boosted investments, maintained economic stability, and positively impacted the tourism and SME sectors in these countries. The implementation of the Local Currency Settlement Framework (LCSF) has also reduced dependency on the US dollar, promoting local currency usage in trade and investment. The use of QR Code payments is essential for accelerating economic development and recovery in ASEAN countries post-pandemic, fostering a digital payment ecosystem that enhances financial inclusion and economic stability.

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah secara signifikan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk dalam bidang ekonomi. Berkurangnya keterlibatan masyarakat telah memberikan dampak yang merugikan bagi perekonomian global. Dampak ini dirasakan oleh semua negara, termasuk negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Beberapa negara telah mengalami kemerosotan ekonomi yang cukup parah sebagai dampak dari wabah Covid-19 yang terjadi sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Di tengah tantangan geopolitik selama pasca wabah Covid-19, terdapat dampak substansial terhadap ekonomi global. Untuk meningkatkan kemampuan suatu negara dalam bertahan dan pulih dari ketidakpastian global, sangat penting untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan di semua negara. Untuk mencegah penurunan ekonomi di seluruh dunia, sangat penting bagi setiap negara untuk memperkuat perlindungan geoekonomi (Burhanuddin & Abdi, 2020).

Integrasi memainkan peran penting dalam upaya ASEAN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia negara-negara anggotanya. Sejak tahun 1992, ketika para kepala negara ASEAN mengamanatkan pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA), serangkaian langkah telah diluncurkan untuk mendorong integrasi (Hasran & Taushia, 2024). Untuk mencapai tujuan ini, ASEAN merumuskan beberapa strategi, protokol, dan instrumen yang dapat meningkatkan sektor-sektor yang diawasinya, termasuk domain ekonomi, sosial, serta militer dan keamanan.

Diskusi mengenai integrasi keuangan ASEAN telah berlangsung sejak Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) pertama yang diselenggarakan pada bulan Maret 1997 di Phuket, Thailand. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Komite Kerja Sistem Pembayaran dan Penyelesaian (WC-PSS) dan Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF) untuk membangun infrastruktur pasar yang kuat. ABIF mewadahi kerja sama bilateral dan multilateral yang memungkinkan bank-bank negara tersebut berekspansi ke luar negeri.

Dalam kerangka ABIF terdapat Kerangka Pembayaran Mata Uang Lokal, yaitu Local Currency Settlement Framework (LCSF), yang memungkinkan pembayaran antar negara anggota dilakukan secara langsung secara bilateral menggunakan sistem pembayaran mata uang lokal, tanpa melalui perantara eksternal ASEAN. LCS disini juga berperan untuk bisa mempromosikan daripada penggunaan mata uang lokal dalam berdagang serta investasi yang dilakukan diantara tiga negara. Maka dari itu, LCS diharapkan dapat menekan ketergantungan mereka pada Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama.

Indonesia telah memimpin percepatan integrasi keuangan ASEAN melalui inovasi *Quick Response Indonesian Standards (QRIS) Code* yang telah berhasil diterapkan di tanah air sejak pertengahan tahun 2019. Penggunaan QRIS terus berkembang pesat secara nasional dan saat ini sedang berlangsung, bahkan sudah digunakan oleh lebih dari 12 juta merchant di seluruh Indonesia. Kesuksesan QRIS di Indonesia karena diluncurkan pada era pandemi Covid-19, ketika digitalisasi untuk mengurangi interaksi fisik menjadi hal yang krusial. Selain itu, layanan QRIS memungkinkan pelanggan bertransaksi dengan mudah di setiap e-wallet hanya dengan satu kode respon cepat.

Negara-negara anggota ASEAN harus fokus pada peningkatan strategi pendidikan keuangan nasional dan mengembangkan interkoneksi dalam sistem pembayaran regional terutama dalam sistem pembayaran digital. Penggunaan pembayaran digital telah berkembang secara signifikan selama dekade terakhir. Terobosan teknologi yang beragam dan model bisnis yang kreatif memungkinkan terciptanya lingkungan pembayaran yang bebas dari mata uang fisik, yang berpotensi mengantarkan masyarakat pada masyarakat yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Dari uang elektronik berbasis chip hingga berbasis server, masyarakat dapat dengan mudah menerimanya, termasuk penggunaan QR Code untuk pembayaran.

ASEAN telah mencapai kemajuan substansial dalam ekonomi digital di kawasan ini, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 4-5% selama satu dekade terakhir. Selain itu, beberapa sektor ekonomi telah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Namun demikian, tantangan yang signifikan masih ada, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kerangka kerja institusional perbankan digital, kekhawatiran terkait privasi dan keamanan, dan kurangnya dukungan (Fernando & Turnip, 2024).

Adopsi teknologi kode QR untuk transaksi belanja saat ini terlihat di lima negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Metode ini dipuji karena efisiensinya dalam memperlancar transaksi, mendorong pertumbuhan investasi, menjaga stabilitas perekonomian baik di tingkat makro maupun mikro, serta memberikan dampak positif pada industri pariwisata dan usaha kecil. Memanfaatkan kode QR memungkinkan individu melakukan transaksi dengan cepat dan nyaman, terlepas dari lokasi atau ketergantungan mata uang. Metode transaksi digital ini tidak hanya mempercepat pembayaran tetapi juga mendorong pembangunan dan stabilitas ekonomi, khususnya bermanfaat bagi sektor pariwisata. Singkatnya, penggunaan kode QR memungkinkan transaksi yang lancar dan cepat secara global tanpa batasan mata uang tunggal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin mengkaji lebih jauh **“Bagaimana penerapan QR Code dalam upaya pembangunan ekonomi lima negara anggota ASEAN pasca pandemi Covid-19?”**. Tujuan dari penulisan artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran pembaca mengenai peran pembayaran digital QR Code dalam mendorong pembangunan ekonomi global di antara para 5 anggota negara ASEAN setelah pandemi Covid-19.

Literatur Review

Tinjauan literatur akan disusun menjadi tiga bagian utama yang relevan dengan penyelidikan ini dan saling berhubungan. Aladdin D. Rillo menulis penelitian perdana tentang proses integrasi keuangan di Asia Tenggara. Kajian pustaka kedua meliputi karya Aldy Nofansya, Hasan Sidik, dan Hadi Nur Muta'ali. Selain itu, Atsal Amar Bani Rachmad dan Maritza Ramadhani Raharjo menulis tinjauan pustaka ketiga yang menjadi referensi komparatif dalam penelitian ini. Studi ini berfokus pada pemanfaatan Kode QR lintas batas di kawasan ASEAN.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Aladdin D. Rillo (2018), berjudul **“ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, and Challenges”** Aladdin menyoroti betapa pentingnya bagi para pembuat kebijakan di ASEAN untuk terus mendorong langkah-langkah konkrit yang akan meningkatkan integrasi keuangan secara menyeluruh. ASEAN menginginkan perekonomian yang berkelanjutan pada tahun 2025. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong pergerakan bebas produk, jasa, dan investasi serta menggunakan teknik berbasis pasar untuk meningkatkan likuiditas dan pasar keuangan untuk integrasi regional. Oleh karena itu, ASEAN harus memprioritaskan kebijakan pertumbuhan industri keuangan. Aladdin mengatakan peningkatan sistem pembayaran yang aman dan efisien sebagai pilihan kebijakan utama. Sistem pembayaran sederhana merupakan alat kebijakan pembangunan daerah serta mitigasi risiko perdagangan dan investasi.

Menurut Aldy Nofansya dan Hasan Sidik (2022) dalam artikel berjudul **“Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Memperkuat Kerangka *Local Currency Settlement (LCS)* dalam *Framework Memfasilitasi Perdagangan*”**. Kedua penulis melaporkan bahwa LCS telah meningkatkan transaksi antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, ringgit LCS tumbuh menjadi 49,6 juta USD per bulan dan melampaui 50 juta USD pada tahun 2020. Perdagangan Bath LCS mencapai 13,7 juta USD per bulan pada tahun 2019. Perekonomian ketiga negara akan mendapatkan keuntungan dari algoritma Longest Common Subsequence (LCS). ASEAN dapat menciptakan jalur konektivitas perdagangan yang maju karena pengaruh ini. Indonesia, Malaysia, dan Thailand menyadari bahwa ketergantungan pada dolar AS dapat menimbulkan masalah keuangan jika stagnan, sehingga berdampak pada inflasi. Negara-negara ketiga mengadopsi sistem keuangan mata uang lokal. Menurut penulis, ada dua cara untuk

meningkatkan penggunaan LCS untuk perdagangan. Mengingatkan pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia untuk menggunakan LCS dan mendorong para pelaku bisnis dan UMKM untuk menggunakan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan yang melibatkan produk-produk berkualitas tinggi adalah dua dari taktik tersebut.

Selanjutnya, dalam penelitian artikel yang ditulis oleh Hadi Nur Muta'ali (Muta'ali, 2020) berjudul "**Keuntungan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam Kerjasama Local Currency Settlement Framework (LCS)**" ditulis oleh Hadi Nur Muta'ali. Hadi menyatakan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah menerapkan penggunaan LCS untuk membiayai ekspor dan impor yang saling berhubungan. Kerangka kerja sama LCS memberikan keuntungan bagi investor dengan memungkinkan investasi langsung di berbagai negara sekaligus meminimalkan biaya lindung nilai. Metode melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal ini sangat menguntungkan bagi investor karena menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan dolar AS. Hadi membuktikan adanya peningkatan cukup besar pada kewajiban bersih investasi luar negeri di Indonesia sebesar US\$ 330,3 miliar pasca ditandatanganinya perjanjian LCS pada tahun 2019.

Kemudian, menurut artikel yang ditulis oleh Atsal Amar Bani Rachmad dan Maritza Ramadhani Raharjo (2023) berjudul "**QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia**". Dalam penelitian tersebut digambarkan bahwa pembayaran digital dalam transaksi perdagangan dan investasi dapat secara efektif mengontrol pergerakan pendapatan dan pengeluaran, sekaligus bertindak sebagai saluran bagi produk kredit yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan aktivitas perusahaan. Selain itu, bentuk perbankan digital yang disebut QRIS Cross Border ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan dan jaminan antara dunia usaha dan nasabah di seluruh kawasan ASEAN. Untuk lebih membangun infrastruktur pembayaran lintas batas yang terintegrasi, negara-negara Asia Tenggara harus mencapai kesepakatan untuk menerapkan QRIS lintas batas yang menggunakan Penyelesaian Mata Uang Lokal sebagai mekanismenya. Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) lintas batas ini akan memfasilitasi dan mendorong integrasi perekonomian dan sistem keuangan regional, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan stabilitas. Karena bagi kedua penulis, QRIS lintas batas dianggap bermanfaat karena dapat berfungsi sebagai landasan bagi diplomasi multi-jalur Indonesia selama kepemimpinannya di ASEAN pada tahun 2023. Indonesia memiliki potensi untuk menunjukkan dan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi negara-negara Tenggara lainnya. Negara-negara Asia dalam menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas batas negara dengan mata uang lokal (LCS). Oleh karena itu, sistem pembayaran gabungan ini (QRIS dan LCS lintas batas) berpotensi meningkatkan inklusi keuangan digital, mengefektifkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing.

Fenomena penggunaan kode QR lintas batas untuk Penyelesaian Mata Uang Lokal merupakan mekanisme transaksi berkelanjutan yang harus diterapkan oleh Kawasan ASEAN di era digital. Indonesia, yang akan menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, berharap dapat mengembangkan kerangka kerja kolaboratif dalam penerapan LCS guna memperdalam integrasi ekonomi regional dan meminimalkan ketergantungan pada mata uang AS.

KERANGKA TEORI

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen ini tidak hanya menjelaskan perihal pertumbuhan ekonomi yang hanya berasal dari faktor external, tetapi pertumbuhan ekonomi juga berasal dari faktor internal yang meliputi Inovasi, penelitian serta pengembangan sumber daya manusia. Teori Pertumbuhan Endogen menyimpulkan bahwa pemikiran yang muncul di teori ini dalam jangka panjang dan dalam tradisi neo - klasik, mengidentifikasi dari sumber pertumbuhannya melalui variabel yang terdapat di dalam model (endogenous), yang sangat berkaitan dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi serta inovasi yang diusung oleh Indonesia untuk ASEAN, memberikan contoh bahwa negara - negara dapat bertumbuh dan memulihkan sektor perekonomiannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi pembangunan ekonomi global lima negara anggota ASEAN melalui penggunaan QR Code pasca pandemi Covid-19. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi QR Code dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan dinamis dalam konteks sosial dan ekonomi. Pendekatan ini membantu dalam menggali perspektif yang mendalam dan berbagai aspek yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang penerapan QR Code dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lima negara anggota ASEAN.

Metode tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data sekunder yang berkaitan dengan subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari beberapa sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, catatan pemerintah, dan publikasi dari organisasi internasional. Berikut adalah Langkah-langkah yang diambil dalam tinjauan literatur ini :

1. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini meliputi:
 - Artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang QR Code, sistem pembayaran digital, dan pembangunan ekonomi di ASEAN.
 - Buku dan laporan yang diterbitkan oleh lembaga penelitian dan organisasi internasional seperti OECD, Bank Dunia, dan IMF.
 - Laporan dan data statistik dari pemerintah negara-negara anggota ASEAN yang terkait dengan penggunaan QR Code dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
 - Publikasi dari Bank Sentral negara-negara ASEAN mengenai kebijakan dan inisiatif yang berkaitan dengan QR Code dan sistem pembayaran digital.
2. **Analisis Data:** Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul dari data yang berkaitan dengan penggunaan QR Code dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Proses analisis melibatkan beberapa tahap:
 - Kategorisasi: Data dikategorikan berdasarkan tema utama yang muncul dari literatur, seperti efisiensi transaksi, peningkatan investasi, stabilitas ekonomi, dan dampak pada sektor pariwisata dan UMKM.

- Interpretasi: Data yang telah dikategorikan diinterpretasikan untuk memahami hubungan antara penggunaan QR Code dan pembangunan ekonomi. Peneliti mengaitkan temuan ini dengan teori dan konsep yang relevan dalam literatur.

3. **Sintesis Temuan:** Temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data kemudian disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran QR Code dalam pembangunan ekonomi lima negara anggota ASEAN. Peneliti menyusun narasi yang menjelaskan bagaimana QR Code telah diimplementasikan dan dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi di negara-negara tersebut.

C. RESULT AND DISCUSSION

1. Implementasi QR Code di 5 Negara ASEAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan dampak besar pada berbagai industri di era digital, khususnya di bidang sistem pembayaran. Awalnya dirancang untuk melacak komponen di bidang manufaktur, teknologi Kode QR kini telah menjadi aset penting dalam memfasilitasi pembayaran digital dalam skala global. Di kawasan ASEAN, meluasnya penerapan teknologi ini dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan aksesibilitas finansial yang lebih besar bagi semua individu.

Sebelum wabah Covid-19, sejumlah negara ASEAN telah mulai menerapkan kode QR dalam sistem pembayaran mereka, meskipun implementasinya agak lamban dan tidak konsisten. Negara-negara dengan infrastruktur digital yang unggul, seperti Singapura dan Malaysia, merupakan pengadopsi awal pembayaran digital, sementara negara-negara lain masih mengandalkan uang tunai. Kode QR semakin dikenal sebagai metode pembayaran di pasar fisik dan perdagangan online, meskipun adopsinya masih terbatas (ASEAN Single Window, 2020).

Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan teknologi keuangan digital untuk meminimalkan pertemuan tatap muka dan potensi penularan Covid-19 (Ika et al., 2020). Memanfaatkan teknologi keuangan secara maksimal dapat merangsang aktivitas ekonomi selama epidemi (Marginingsih, 2021). Hal ini memberikan insentif kepada lembaga keuangan untuk mengadopsi transaksi berbasis teknologi digital dalam satu aplikasi, sehingga menyederhanakan transaksi masyarakat (Sumadi, 2020)

Wabah Covid-19 menjadi momen penting bagi penerimaan dan pemanfaatan Kode QR secara luas di kawasan ASEAN. Pembatasan sosial dan prosedur kesehatan yang diberlakukan telah mendorong penghindaran sentuhan fisik, terutama dalam konteks melakukan pembayaran. Uang tunai dianggap sebagai vektor potensial untuk penularan virus, sehingga mengarah pada preferensi untuk opsi pembayaran non-tunai seperti Kode QR. Pandemi mempercepat proses transformasi digital di berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan signifikansi Kode QR sebagai mekanisme pembayaran yang aman dan sehat.

Penerapan Kode QR di negara-negara ASEAN selama wabah Covid-19 menunjukkan pentingnya teknologi pembayaran digital ini dalam mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Bank Indonesia telah menerapkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) sebagai standar nasional resmi Kode QR di Indonesia. Tujuan dari standar ini adalah untuk menyatukan banyak sistem pembayaran menjadi satu standar yang dapat digunakan secara universal di seluruh negeri. Penerapan QRIS oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel modern, dan pasar tradisional telah memfasilitasi perluasan inklusi keuangan dengan menyederhanakan transaksi digital bagi individu yang tidak memiliki rekening bank.

Selain itu, hal ini juga berdampak pada penurunan biaya transaksi dan peningkatan efektivitas operasional bisnis.

Bank Negara Malaysia di Malaysia telah menciptakan standar nasional untuk Kode QR yang dikenal sebagai "DuitNow QR" untuk menjamin kompatibilitas di antara penyedia layanan pembayaran yang berbeda. Platform dompet elektronik termasuk Touch 'n Go, Boost, dan GrabPay telah menggunakan DuitNow QR, sistem pembayaran yang digunakan di berbagai industri seperti ritel, transportasi, dan layanan publik. Di Malaysia, penerapan Kode QR telah menghasilkan penurunan biaya operasional perusahaan, peningkatan produktivitas, dan memfasilitasi lebih banyak inklusi keuangan dengan menyederhanakan akses ke layanan keuangan digital (Paynet, 2019).

Thailand menerapkan PromptPay, sebuah proyek pemerintah yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran menggunakan nomor telepon atau Kode QR. PromptPay digunakan secara luas di domain ritel, pasar konvensional, dan layanan publik. Kode QR yang diterapkan melalui PromptPay memfasilitasi penurunan ketergantungan pada mata uang fisik, meningkatkan visibilitas dan akuntabilitas, menurunkan biaya operasional, dan mengurangi kemungkinan pencurian dan kehilangan uang tunai. Dalam industri pariwisata, banyak tempat wisata dan tempat makan dengan mudah menerima pembayaran dengan PromptPay, sehingga menyederhanakan proses bagi wisatawan dan meningkatkan kenyamanan mereka secara keseluruhan (Mastercard, 2021).

Bank Sentral Filipina (BSP) di Filipina mendukung penggunaan Kode QR sebagai komponen rencananya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong penerapan sistem pembayaran digital. Kode QR telah diterapkan oleh platform pembayaran digital seperti GCash dan PayMaya di beberapa sektor termasuk angkutan umum, ritel, dan e-commerce. Kode QR di Filipina meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi, meminimalkan biaya operasional, dan memperluas aksesibilitas layanan keuangan hingga wilayah terpencil. Kode QR digunakan dalam industri transportasi umum, khususnya jeepney dan bus, untuk memfasilitasi pembayaran tiket. Metode ini menyederhanakan proses bagi penumpang dan mengurangi ketergantungan pada mata uang fisik.

Vietnam secara aktif mempromosikan penggunaan Kode QR untuk meningkatkan digitalisasi dan meningkatkan inklusi keuangan, dengan dukungan kuat pemerintah dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Kode QR digunakan oleh berbagai lembaga keuangan dan platform pembayaran digital, dan penerapannya dipromosikan di industri ritel, perbankan, dan layanan publik. Kode QR digunakan di Vietnam untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efektivitas operasional, dan memperluas ketersediaan layanan keuangan bagi individu yang tidak dilayani oleh metode perbankan konvensional. Dalam industri ritel, banyak toko di daerah perkotaan besar seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh menggunakan metode pembayaran Kode QR, sehingga memfasilitasi transaksi konsumen dan meningkatkan kenyamanan berbelanja.

Bank Indonesia telah menerapkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) sebagai standar nasional resmi Kode QR di Indonesia. Tujuan dari standar ini adalah untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran menjadi satu standar yang dapat digunakan secara universal di seluruh negeri. Penerapan QRIS oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel modern, dan pasar tradisional telah memfasilitasi perluasan inklusi keuangan dengan menyederhanakan

transaksi digital bagi individu yang tidak memiliki rekening bank. Selain itu, hal ini juga berdampak pada penurunan biaya transaksi dan peningkatan efektivitas operasional bisnis.

2. Perkembangan QRIS di Indonesia

Pertumbuhan QRIS di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan tren yang signifikan. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 sebagai langkah penting dalam standarisasi transaksi menggunakan kode QR. Bank Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai langkah registrasi, penggunaan, dan manfaat penggunaan QRIS pada awal tahun 2019 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan perekonomian (*Makin Signifikan, Begini Perkembangan QRIS Di Indonesia, 2022*).

Tahun 2019, QRIS diluncurkan secara nasional dan digunakan oleh lebih dari 20 juta merchant di Indonesia. Pemanfaatan QRIS tidak hanya terbatas pada perusahaan besar saja namun juga UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang telah menambahkan QRIS pada gerai atau gerainya. Dengan QRIS, para pedagang UMKM dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah, aman dan cepat, sekaligus menghemat sebagian pendapatan yang dihasilkan dari hasil usahanya.

Pada tahun 2021, jumlah merchant QRIS mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, meningkat sebesar 155,66%. Jumlah ini naik dari 5,78 juta merchant pada akhir tahun 2020 menjadi 14,78 juta merchant. Pertumbuhan rata-rata jumlah merchant QRIS sepanjang tahun 2021 mencapai 8,21% per bulan.

Terdapat peningkatan jumlah Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang terdaftar di QRIS. PJP lain yang belum terdaftar sangat dianjurkan untuk mendaftar dan memenuhi persyaratan sesegera mungkin untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan QRIS.

Rata-rata volume transaksi QRIS per merchant pada tahun 2021 mengalami peningkatan marjinal menjadi 25 transaksi per tahun, dibandingkan dengan 21 transaksi per tahun pada tahun 2020, yang menandakan peningkatan sebesar 18%. Rata-rata volume transaksi per merchant berkisar antara 2,2 hingga 4,5 transaksi per bulan. Nilai nominal rata-rata transaksi QRIS per merchant pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp1,87 juta per merchant dari Rp1,42 juta per merchant pada tahun 2020, yang menunjukkan peningkatan sebesar 32%. Dalam periode satu bulan, nominal transaksi per merchant bervariasi antara Rp171 ribu hingga Rp320 ribu (*Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, 2021*).

Rata-rata volume dan nilai nominal transaksi QRIS per merchant masih relatif rendah, yang berpotensi disebabkan oleh adanya sejumlah besar merchant yang kurang aktif atau tidak memprioritaskan QRIS dalam transaksinya. Oleh karena itu, PJP harus melakukan upaya untuk mendorong peningkatan transaksi di setiap merchant QRIS yang terdaftar dan mendeteksi merchant yang tidak aktif, sehingga dapat meningkatkan rata-rata volume dan nilai nominal transaksi QRIS per merchant.

Distribusi merchant QRIS masih sangat terkonsentrasi dan tidak merata. Mayoritas merchant QRIS, sekitar 70%, terkonsentrasi di 50 kabupaten/kota tertentu, dengan 30% sisanya tersebar di 270 kabupaten/kota lainnya. Untuk memperluas jumlah merchant baru di provinsi-provinsi di luar Jawa, sangat penting untuk berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga. Hal ini dapat dicapai melalui inisiatif seperti Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan program-program lain yang mendorong adopsi QRIS secara luas di seluruh Indonesia. Selain itu, bank-bank daerah, seperti BPD, dan PJP non-bank memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengejar prospek QRIS di tingkat daerah (*ASPI, 2022*).

3. Upaya Indonesia menjadikan QRIS menjadi QR Cross Border

Kemajuan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat dan memudahkan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selama pandemi, teknologi telah memungkinkan kita untuk bekerja dan berkomunikasi secara daring tanpa harus hadir secara fisik di kantor. Pandemi ini, meskipun penuh tantangan, telah mendorong percepatan adopsi teknologi dan mempercepat peralihan menuju era digital. Seperti halnya evolusi dari menonton program televisi tradisional ke layanan streaming di media sosial, berbagai aspek kehidupan kita juga mengalami transformasi digital.

Kemajuan teknologi sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan keharusan untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk keharusan untuk menjaga produktivitas selama pandemi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, berbagai inovasi muncul untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang di segala aspek kehidupan. Sektor ekonomi dan keuangan telah mengalami metamorfosis yang cukup besar. Kini, dengan bantuan sebuah gawai, kita dapat dengan mudah dan efektif melakukan transaksi. Keterlibatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi penting dalam penemuan ini.

QRIS adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran digital. Dengan QRIS, transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Implementasi QRIS telah membawa perubahan besar dalam cara kita bertransaksi, baik di tingkat individu maupun bisnis. QRIS memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran di ponsel mereka. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan digital, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.

Bank Indonesia telah melangkah lebih jauh dengan melakukan uji coba QR lintas batas dengan Malaysia dan Thailand. Program ini memungkinkan nasabah dan pedagang di kedua negara untuk melakukan transaksi barang dan jasa menggunakan kode QR. Kode QR lintas batas sangat penting untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memfasilitasi digitalisasi perdagangan dan investasi, serta memastikan stabilitas makroekonomi melalui peningkatan adopsi penyelesaian dalam mata uang lokal (Local Currency Settlement, LCS) (BI, 2024).

Implementasi QR Cross-border diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi UMKM, karena memudahkan konsumen mancanegara untuk bertransaksi saat membeli produk lokal. Selain itu, sektor pariwisata juga akan mendapatkan manfaat besar. Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dapat menggunakan QR Cross-border untuk bertransaksi dengan mudah, tanpa harus menukar mata uang mereka. Sebaliknya, warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri dapat menggunakan QR Cross-border untuk melakukan pembayaran dengan cara yang sama.

QR Cross-border memiliki potensi besar untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Dengan memfasilitasi transaksi lintas negara, QR Cross-border dapat mengurangi hambatan perdagangan internasional dan investasi. Ini memberikan keuntungan langsung bagi UMKM yang dapat memperluas pasar mereka ke konsumen internasional. Selain itu, sektor pariwisata dapat menarik lebih banyak wisatawan dengan menyediakan metode pembayaran yang lebih mudah dan efisien.

Dalam konteks yang lebih luas, QR Cross-border juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi makro. Dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi internasional, risiko fluktuasi nilai tukar dapat diminimalkan. Ini juga membantu dalam menjaga cadangan devisa negara dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing.

Dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan, tidak mengherankan jika Pembayaran Lintas Batas, khususnya QR Lintas Batas, telah muncul sebagai topik penting dalam pembahasan keuangan di Presidensi G20. Bank Indonesia berdedikasi untuk memajukan metode pembayaran digital ini lebih lanjut, sambil mempertimbangkan dengan cermat keseimbangan antara mendorong inovasi dan meminimalkan potensi bahaya. Dalam platform internasional seperti G20, sangat penting untuk terlibat dalam diskusi dan menetapkan tolok ukur yang dapat diterapkan secara universal untuk menjamin kelancaran dan perlindungan sistem pembayaran di berbagai negara.

Meskipun potensi QR Cross-border sangat besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah harmonisasi regulasi antara negara-negara yang terlibat. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait dengan sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antar pemerintah dan otoritas keuangan untuk menyelaraskan regulasi dan memastikan kepatuhan.

Selain itu, masalah keamanan dan perlindungan data juga menjadi perhatian utama. Sistem pembayaran digital rentan terhadap serangan siber dan pencurian data. Oleh karena itu, pengembangan QR Cross-border harus disertai dengan penguatan infrastruktur keamanan dan penerapan teknologi enkripsi yang canggih. Edukasi dan peningkatan kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan juga sangat penting.

Bank Indonesia dapat mengadopsi beberapa strategi untuk mengatasi tantangan ini:

1. Kerjasama Internasional: Memperkuat kerjasama dengan bank sentral dan otoritas keuangan di negara-negara mitra untuk harmonisasi regulasi dan kebijakan.
2. Penguatan Infrastruktur Keamanan: Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data transaksi dan pengguna.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan QR Cross-border.
4. Inovasi Berkelanjutan: Terus mendorong inovasi dalam teknologi pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan.

Keberhasilan implementasi QR Cross-border dengan Malaysia dan Thailand dapat menjadi model bagi kerjasama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan wilayah lainnya. Dengan memperluas jaringan QR Cross-border, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi di kawasan Asia Pasifik. Ini tidak hanya akan meningkatkan volume perdagangan dan investasi, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik antar negara. Penggunaan QR Cross-border tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dengan memfasilitasi transaksi lintas negara, QR Cross-border dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Ini membuka peluang bagi UMKM dan individu untuk

terlibat dalam ekonomi digital dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, QR Cross-border juga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan mendukung transaksi digital, QR Cross-border membantu dalam mengurangi jejak karbon dan mendukung inisiatif lingkungan. Digitalisasi transaksi juga mengurangi kebutuhan akan sumber daya fisik seperti kertas dan tinta, yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

4. Dampak Positif dari Pembayaran Cross Border

a. Dampaknya bagi Pengguna Qris Antar Negara

Penggunaan QRIS antarnegara memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama dalam mempermudah kegiatan bertransaksi. Ketika seseorang berlibur ke Singapura, misalnya, mereka biasanya harus menukarkan uang rupiah dengan dolar Singapura untuk berbelanja atau menggunakan kartu debit. Kegiatan ini bisa menjadi sedikit merepotkan karena uang yang ditukar sering kali tidak dapat dipecah menjadi nominal yang lebih kecil, sehingga pembayaran sering harus dilakukan dengan nominal besar.

Namun, dengan adanya QRIS antarnegara, kegiatan berbelanja menjadi lebih mudah. Selain itu, penggunaan QRIS antarnegara juga mendukung UMKM di berbagai negara. Bank Indonesia memastikan bahwa penggunaan QRIS tidak hanya terpusat pada toko-toko besar di mal, tetapi juga mencakup usaha-usaha kecil masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat merasakan kemudahan dari inovasi QRIS ini.

QRIS antarnegara juga dibuat sebagai respons terhadap tingginya minat wisatawan yang mengunjungi negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Melihat potensi wisata yang tinggi di keempat negara ini, Bank Indonesia berinovasi menciptakan sistem pembayaran non-tunai yang dapat diakses hanya dengan memindai kode QR dan digunakan di keempat negara tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dan ketiga negara lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Siahaan, 2023).

b. Dampak QRIS Terhadap Pedagang ataupun Pengusaha (Merchant)

Dalam ranah uang elektronik, pelaku usaha atau merchant adalah individu atau perusahaan yang menawarkan jasa pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dalam transaksinya. Tujuan perusahaan dalam menerapkan strategi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional mereka. Perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan aktivitas dan ekspansi bisnis dengan mencapai pertumbuhan konsumsi dan meningkatkan efisiensi biaya transaksi. Semakin tinggi efisiensi biaya transaksi yang dicapai melalui penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, semakin besar pula kemungkinan untuk meningkatkan hasil bisnis. Fenomena ini kemudian mendorong peningkatan produksi di sektor riil, sehingga memiliki kapasitas untuk mempercepat ekspansi ekonomi.

Dengan memanfaatkan layanan QRIS, organisasi dapat secara efektif mengurangi kesalahan dalam transaksi dan mengoptimalkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses transaksi. Pelaku bisnis mendapatkan manfaat dari setiap transaksi, seperti jaminan keamanan transfer uang langsung ke rekening mereka (Siti, 2006).

Pengusaha berharap kehadiran QRIS akan membawa dampak signifikan bagi efektivitas dan efisiensi operasional bisnis mereka. Harapannya adalah efektivitas yang dicapai melibatkan percepatan waktu dalam proses transaksi pembayaran. Hal ini disebabkan oleh penggunaan QR Code yang menghilangkan kebutuhan pengusaha untuk memberikan uang kembalian dan mengeliminasi kebutuhan untuk melakukan perhitungan uang secara manual. Pengusaha juga tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melayani pembayaran dalam jumlah kecil atau mikro (Permana et al., 2024).

D. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi global melalui QR Code pasca pandemi Covid-19 di lima negara anggota ASEAN merupakan langkah signifikan dalam memanfaatkan inovasi teknologi untuk mempercepat pemulihan ekonomi regional. QR Code, khususnya dengan implementasi QRIS, telah memberikan dampak positif yang besar terhadap inklusi keuangan dan efisiensi transaksi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Teori pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa inovasi dan pengembangan sumber daya manusia menjadi landasan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan QR Code, terutama melalui QRIS, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan digital bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi bisnis dan perdagangan.

QR Code memiliki keunggulan dalam menyediakan informasi secara cepat dan efisien, dengan kapasitas untuk menyimpan lebih banyak data daripada barcode konvensional. Implementasi QRIS di Indonesia, sebagai contoh, telah memungkinkan pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, untuk mengintegrasikan sistem pembayaran yang lebih efektif dan aman, meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan ekonomi bagi semua pihak.

Dengan standarisasi QRIS oleh Bank Indonesia dan adopsi internasional melalui QR Cross-border, negara-negara ASEAN dapat memperluas pasar mereka secara regional dan global. Ini bukan hanya meningkatkan kemudahan bertransaksi lintas batas, tetapi juga mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, serta mendukung stabilitas ekonomi makro di kawasan. Secara keseluruhan, implementasi QR Code, khususnya QRIS, adalah langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN pasca pandemi Covid-19, melalui peningkatan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan integrasi pasar regional yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Single Window. (2020). *All 10 ASEAN Member States Exchange the ATIGA e-Form D through the ASEAN Single Window*.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2021). *Berita Statistik-Sistem Pembayaran Indonesia Triwulan II-2021 Volume Transaksi QRIS (jutaan)*.

ASPI. (2022). *Berita Statistik Sistem Pembayaran Indonesia Triwulan I- 2022*.

BI. (2024). *QRIS Cross-border Solusi Transaksi Antar Negara*.

Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). *Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/AKMEN.V17I1.866>

Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2024). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, 4(2), 114–134.

<https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>

- Hasran, & Taushia, K. (2024). *Strategi Indonesia untuk Bergabung dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN*. <https://repository.cips-indonesia.org/es/publications/567551/strategi-indonesia-untuk-bergabung-dalam-perjanjian-kerangka-kerja-ekonomi-digit#cite%0A>
- Ika, F., Pratiwi, S. P., & Djatikusumo, I. (2020). Minat Penggunaan Cashless Payment System – Dompet Digital Pada Mahasiswa Di FE UNJ. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 11(1), 1–19. <https://doi.org/10.21009/JRMSI.011.1.01>
- Marginingsih, R. (2021). *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*. 8(1).
- Mastercard. (2021). *Transforming Thailand to a digital economy*. <https://b2b.mastercard.com/news-and-insights/success-story/thailand-promptpay/#:~:text=A real-time payments infrastructure and proxy lookup service,complicated details%2C so there's less risk of error.>
- Muta'ali, H. N. (2020). Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama Local Currency Settlement Framework (LCS). *E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 08.
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Memperkuat Kerangka Local Currency Settlement (LCS) dalam Framework Memfasilitasi Perdagangan. *Padjajaran Journal of International Relations*.
- Paynet. (2019). *PUBLIC BANK FIRST TO SOFT LAUNCH MALAYSIA'S NATIONAL QR STANDARD: DUITNOW QR*. July, 1–2.
- Permana, R., Attaullah, R., Pratiwi, Y., & Yanti, S. A. (2024). DAMPAK IMPLEMENTASI QRIS TERHADAP PERUBAHAN SISTEM KEUANGAN NASIONAL. *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 133–138.
- Rachmad, A. A. B., & Raharjo, M. R. (2023). QRIS Cross Border'as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia. *Global Local Interactions: Journal of International Relations*.
- Rillo, A. D. (2018). *ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, and Challenges*.
- Siahaan, J. E. (2023). Analisis Penggunaan QRIS di Beberapa Negara Asia Tenggara. *International Relations, Taylor 1979*.
- Sumadi. (2020). *MENAKAR DAMPAK FENOMENA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERBANKAN SYARIAH*.